

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengeluaran Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Pengeluaran

Pengeluaran pemerintah adalah total belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan berbagai fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Pengeluaran ini meliputi berbagai sektor dan program, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, pelayanan sosial, subsidi, dan lain sebagainya. Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Sitaniapessy, 2013).

Dalam konteks analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan, fokus penelitian difokuskan pada dua sektor, yaitu pendidikan dan kesehatan (Anitasari, M., & Soleh, A., 2015). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, dan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, pengeluaran di sektor kesehatan mencakup pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan, program-program vaksinasi, penyuluhan kesehatan, dan pemberian subsidi bagi akses kesehatan masyarakat (Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N., 2020).

Pengeluaran pemerintah dalam kedua sector ini diharapkan memiliki dampak positif terhadap kemiskinan (Mahzalena, Y., & Juliansyah, H, 2019). Pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang kerja yang lebih baik bagi individu dan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan (Mongan, J. J. S., 2019). Sementara itu, akses kesehatan yang baik dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas (Pratiwi, N. P. A., &Indrajaya, I. G. B., 2019).

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Suparmoko (1998) menjelaskan bahwa pengeluaran dikelompokkan menjadi 2 bagian sebagai berikut:

1. Pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, yakni untuk pembiayaan gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan. Pengeluaran rutin ini memiliki peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap-tahap pembangunan.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun (Rachmat, 2010: 139). Anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dari pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas dan keperluan negara dan penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran dalam periode tertentu, agar tidak menimbulkan defisit anggaran.

2.1.1.2. Teori-Teori Pengeluaran

Teori-teori pengeluaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami perilaku konsumen dan faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran individu, rumah tangga, atau masyarakat dalam suatu perekonomian (Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S., 2019). Berikut beberapa teori utama mengenai pengeluaran:

- 1) Teori Utilitas, Teori ini berasumsi bahwa konsumen bertindak rasional dan berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari pengeluaran mereka. Teori ini membantu menjelaskan mengapa konsumen memilih kombinasi barang dan jasa tertentu dalam rangka memaksimalkan kepuasan, dengan mempertimbangkan faktor harga dan preferensi.
- 2) Teori Pengeluaran Keynesian, Teori ini dikembangkan oleh ekonom John Maynard Keynes dan menekankan pentingnya pengeluaran agregat (total pengeluaran dalam perekonomian) dalam menentukan tingkat aktivitas ekonomi. Menurut teori ini, pengeluaran konsumen, investasi, dan

pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung terhadap output dan pertumbuhan ekonomi.

- 3) Teori Siklus Hidup Konsumsi, Teori ini berpendapat bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tahap-tahap siklus hidup individu. Konsumsi cenderung tinggi pada awal dan akhir siklus hidup, ketika pendapatan lebih rendah, sementara konsumsi cenderung lebih rendah pada tahap pertengahan ketika pendapatan mencapai puncaknya.
- 4) Teori Pengeluaran Sisa, Teori ini mengajukan bahwa konsumen cenderung mengelola pengeluaran mereka dengan mempertimbangkan sisa pendapatan setelah memenuhi kebutuhan dasar. Mereka akan mengalokasikan sisa pendapatan ini untuk pengeluaran yang lebih bersifat hiburan atau kepuasan tambahan.
- 5) Teori Arah Pengeluaran, Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mengikuti arah tren dalam pengeluaran masyarakat secara umum. Jika pengeluaran secara keseluruhan naik, individu juga cenderung untuk mengikuti tren tersebut dan sebaliknya.

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah akan mencerminkan kebijakan pemerintah itu sendiri (Ariwuni, M., & Kartika, I., 2019). Apabila pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Ichvani, L. F., & Sasana, H., 2019). Dalam hal ini terdapat teori pengeluaran pemerintah yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan teori makro:

1. Pengeluaran pemerintah secara makro, yaitu berkaitan dengan teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang public dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut: (1) perubahan permintaan akan barang public, (2) perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang public, (3) perubahan kualitas barang public dan (4) perubahan harga faktor-faktor produksi.
2. Pengeluaran pemerintah secara makro, yaitu terdapat beberapa teori di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Teori Keynes, yaitu persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y=C+G+(X-M)$ dimana (Y) adalah pendapatan nasional, (C) pengeluaran konsumsi, (G) pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui tentang betapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah didalam pembentukan pendapatan nasional, (2) Teori Rostow dan Musgrave yaitu teori yang didasarkan pandangan mereka mengenai pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Model ini akan menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.

Penyusunan anggaran akan mengandung suasana politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan politik (Sony, 2010: 58). Rancangan anggaran negara yang memuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran tersebut harus

memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar memperoleh legitimasi dalam bentuk undang-undang (Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S., 2019). Setelah memperoleh persetujuan, rancangan anggaran negara berubah menjadi undang-undang anggaran negara yang disingkat menjadi anggaran negara (Rachmat, 2010: 143).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah akan mencerminkan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan akan berdampak terhadap banyak aspek.

2.1.2. Kemiskinan

Secara teoretis kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal. Bank Dunia secara operasional mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, sakit yang tidak mampu untuk berobat, ketiadaan akses ke sekolah dan ketidakmampuan membaca, tidak adanya pekerjaan dan kekhawatiran akan kehidupan dimasa yang akan datang, sanitasi yang buruk, serta ketidakberdayaan dan kebebasan dalam politik (Idris, 2022). Sedangkan definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia utamanya dalam mengukur kemiskinan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/kapita/hari) maupun kebutuhan dasar non-makanan (Putri, 2023).

Khandker dan Haughton (2009) menjelaskan setidaknya terdapat tiga aspek yang mendorong terjadinya perbedaan kemiskinan antar wilayah yaitu aspek rumah tangga, aspek masyarakat atau komunitas, dan aspek wilayah atau wilayah.

Pertama, berdasarkan kapasitas rumah tangga, penduduk miskin dicirikan dengan mayoritas bekerja di sektor informal, khususnya sektor pertanian, memiliki pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan yang rendah, aset yang dimiliki pun sedikit, terlebih faktor produksi dan aset lainnya seperti tanah, rumah serta alat produksi, serta angka ketergantungan yang tinggi (Hakim & Wijaya, 2021). Sehingga rendahnya kapasitas rumah tangga ini menyebabkan penduduk miskin sulit untuk mengakses peluang ekonomi. Kedua, berdasarkan aspek komunitas, kemiskinan bisa dipengaruhi oleh norma kebudayaan, kebiasaan, adat – istiadat serta agama yang ada di suatu wilayah (Syahri & Gustiara, 2020).

Dalam hal ini, lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin, memiliki bias persepektif terhadap kemiskinan, yakni kondisi seseorang yang tidak memiliki daya juang untuk bangkit atau keluar dari kemiskinan (Fajrin, 2021). Ketika suatu rumah tangga berada dalam lingkungan yang tidak cemas dengan kemiskinan yang mereka alami, tidak adanya keinginan untuk berkembang, pasrah terhadap keadaan yang membelenggu mereka, dan berpandangan bahwa segala sesuatu adalah takdir, maka akan semakin mempersulit keluar dari lingkaran kemiskinan (Pratiwi, 2022). Kemudian yang terakhir, berdasarkan kapasitas wilayah, dijelaskan bahwa bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam wilayah tersebut, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari wilayah lain disekitarnya. Dimana kemiskinan disebabkan oleh adanya perbedaan ketersediaan infrastruktur yang membuat aktivitas ekonomi antar wilayah berbeda pula (Fitri, 2023).

Kemiskinan merujuk pada keadaan di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, aset, dan peluang ekonomi lainnya, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai standar hidup yang layak (Pratiwi, 2022). Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan, perumahan layak, pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kemiskinan bisa bersifat relatif maupun absolut:

- 1) Kemiskinan Relatif: Merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan atau standar hidup yang jauh lebih rendah daripada mayoritas masyarakat di sekitarnya. Kemiskinan relatif lebih terkait dengan perbandingan dalam konteks sosial dan ekonomi.
- 2) Kemiskinan Absolut: Merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pakaian, dan layanan kesehatan. Kemiskinan absolut lebih fokus pada ketersediaan dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, ketidakmerataan distribusi pendapatan, kurangnya peluang ekonomi, pekerjaan dengan upah rendah atau tidak stabil, kurangnya pendidikan, masalah kesehatan, dan faktor struktural lainnya. Kemiskinan juga dapat terkait dengan faktor geografis, budaya, dan politik (Fitri, 2023). Upaya untuk mengatasi kemiskinan melibatkan langkah-langkah seperti:

- 1) Peningkatan Akses ke Pendidikan: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu, serta membantu memutus lingkaran kemiskinan.
- 2) Peningkatan Akses ke Pelayanan Kesehatan: Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan membantu mengurangi beban biaya kesehatan yang membebani keluarga miskin.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses ke sumber daya ekonomi seperti modal usaha dapat membantu individu dan keluarga keluar dari kemiskinan.
- 4) Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial: Program bantuan sosial, seperti tunjangan keluarga, bantuan pangan, dan jaminan sosial, dapat membantu meringankan dampak kemiskinan pada keluarga miskin.
- 5) Pengembangan Infrastruktur dan Akses ke Pasar Kerja: Meningkatkan akses ke pasar kerja, infrastruktur, dan peluang ekonomi dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
- 6) Pengentasan Kesenjangan Ekonomi: Upaya mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kesenjangan sosial dapat membantu mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan berbagai tingkatan pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat (Rachmawati, 2023).

Akan tetapi penelitian ini terfokus pada analisis makro yaitu analisis kemiskinan berdasarkan kapasitas wilayah. Kapasitas wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur fisik ataupun non fisik. Infrastruktur non fisik mengarah pada akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan keuangan. Sementara infrastruktur fisik lebih mengarah pada aksesibilitas terhadap fasilitas publik seperti jalan, listrik, air dan irigasi (Laksono, 2021).

Berdasarkan teori produksi ketika infrastruktur ini berkembang baik, maka akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi suatu wilayah. Aktivitas ekonomi dapat dilihat dari dua aspek yaitu partisipasi dan pendapatan masyarakat (Fitri, 2023). Aktivitas ekonomi yang berkembang ditandai dengan semakin eratnya interaksi antar daerah dan semakin tingginya mobilitas faktor produksi ataupun barang dan jasa antar daerah satu dengan daerah lainnya. Masyarakat semakin mudah mengakses pasar dan mencari pekerjaan diwilayah sekitar (Fajrin, 2021). Sehingga semakin lancarnya aktivitas ekonomi suatu wilayah maka akan memberikan peluang dalam peningkatan pendapatan. Kusnetz menjelaskan bahwa pendapatan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bekerja, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan wilayah tersebut.

2.1.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal:
 - 1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - 2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (human capital) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan.

Menurut Becker dan Schultz pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dapat lebih produktif dalam membangun bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Tobing mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

2.1.3. Kesehatan

IPM kini sudah dipakai sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu prioritas pembangunan selalu diarahkan pada upaya peningkatan IPM di wilayahnya. Wajar bila banyak Pemerintah Daerah yang memprioritaskan 3 pilar pembangunan yaitu: ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Untuk bidang kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah angka harapan hidup saat lahir.

Angka Harapan Hidup saat lahir (*expectation of life at birth*) yang biasanya dilambangkan dengan simbol e_0 dan sering disingkat dengan AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau lama tahun yang diharapkan seseorang masih hidup. AHH ini merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan dibidang kesehatan. AHH dihitung dari hasil sensus dan survey kependudukan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, sehingga diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mulai dari memberikan penyuluhan akan pentingnya pola hidup sehat, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil, menambah jumlah tenaga kesehatan, mengusahakan obat murah (generik) hingga asuransi kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. AHH diasumsikan dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Jika derajat kesehatan seseorang baik, maka diasumsikan orang tersebut dapat hidup lebih lama dibandingkan dengan orang dengan derajat kesehatan dibawahnya. Salah satu indikator kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu meningkatkan angka harapan hidup menjadi 72 tahun. Angka harapan hidup ini juga dapat menunjukkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf

kesehatan secara keseluruhan. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Disamping itu kesehatan tidak dapat dinapikkan bahwa perannya sangat vital dalam menjaga kestabilan perekonomian maksudnya adalah ketika kesehatan dapat terjaga sudah barang tentu aktivitas disektor ekonomi akan berjalan dengan lancar. Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
2. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

3. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
4. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1.4. Teori Hubungan Antara Variabel

2.1.4.1. Hubungan Pengaruh Pendidikan dan Terhadap Kemiskinan

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Angka Kemiskinan Menurut Simmons (dalam Todaro, 2010), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan pendidikan juga merupakan tujuan pembangunan yang mendasar yaitu memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan (baik formal maupun nonformal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan

untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2015).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh kemakmuran. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

2.1.4.2. Hubungan Pengaruh Kesehatan dan Terhadap Kemiskinan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Menurut Arsyad (2010) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energiy.

2.1.4.3. Hubungan Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Pengeluaran Pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan komposisi yang diperlukan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran pada kedua sektor ini dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong pembangunan ekonomi kearah yang lebih maju, sehingga pada akhirnya pembangunan ekonomi yang maju tersebut akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan melepaskan masyarakat miskin dari jeratan kemiskinan. (Adi Widodo, et al, 2011)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan sudah banyak dilakukan. Oleh karena itu untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dan menemukan adanya kebaharuan penelitian, berikut merupakan penelitian terdahulu:

Adi Widodo, Waridin dan Johanna (2011) dengan judul penelitian Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di provinsi jawa Tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel

independen dalam kemiskinan Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain (variabel IPM).

Suprianto (2017) membahas mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa 2010-2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa dimana jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015. Kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015. Dan secara simultan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015.

Mahendra (2020) dengan judul penelitian Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan, inflasi dan kemiskinan terhadap IPM dengan kemiskinan terhadap IPM dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating di Indonesia. Dari hasil uji F, disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan selama periode 2000 sampai dengan 2019 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima dan Berdasarkan uji parsial (uji t), variabel Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi berpengaruh nyata

secara parsial sedangkan variabel Kemiskinan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan pengujian pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha = 5\%$).

Rise (2015) membahas mengenai pengaruh pendidikan, pengangguran dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di 36 Sumatera Barat. Di mana hasilnya bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Secara simultan pendidikan, jumlah pengangguran, dan tingkat kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat.

Rizky, Handry dan Rahayu (2021) dengan judul penelitian Dampak pengeluaran pemerintah sector pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dengan hasil regresi bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara parsial belum memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia dan hasil regresi bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur belum memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia dan hasil regresi bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Rismawati (2018) meneliti mengenai pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. Di mana hasilnya jumlah penduduk di Kabupaten Gowa tahun 2007-2016 berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Tingkat pendidikan dilihat dari persentase penduduk miskin yang tamat SD/SMP di Kabupaten Gowa tahun 2007-2016 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin karena apabila hanya 97 berpendidikan setingkat SMP hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga kurang terakomodasi dalam pasar kerja yang memberi jaminan upah. Dan kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup di Kabupaten Gowa tahun 2007–2016 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Suryandari (2017) Membahas Mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014. Dimana Hasilnya Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat miskin sehingga efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan diukur dengan Rata-rata lama sekolah 38 tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan sektor yang mendominasi di Provinsi DIY yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian yang keduanya tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Selain itu, adanya mismatch antara pendidikan dan tingkat pekerjaan yang terdapat

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Angka harapan hidup penduduk DIY tergolong tinggi. Kesadaran penduduk DIY akan pentingnya kesehatan sangat tinggi dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai sangat mendukung kesehatan di Provinsi DIY.

Didu dan Ferri (2016) melihat pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa jumlah 39 penduduk (JP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Pendidikan (PEN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Dan pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak.

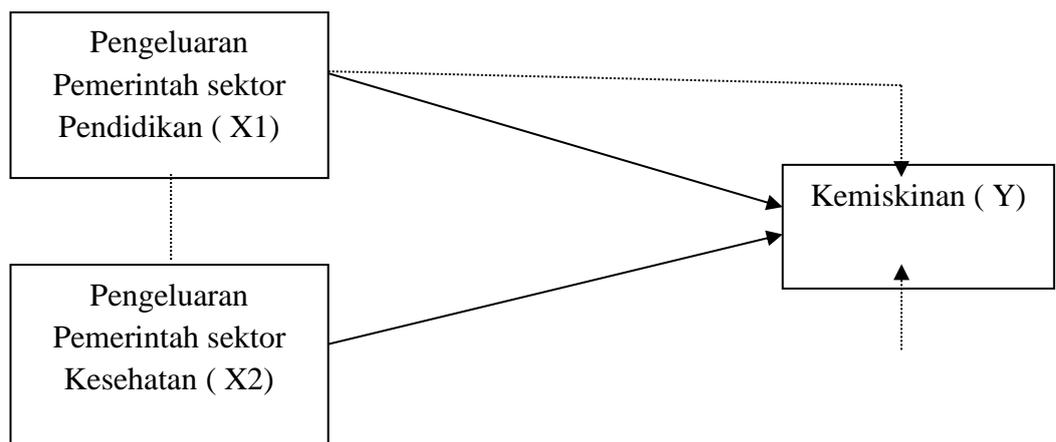
Paulo, Izak Kawatu & Tolosang (2018) yang meneliti mengenai kebijakan di bidang kesehatan yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan di bidang Pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa, atau dengan kata lain kebijakan dibidang pendidikan yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan di bidang sosial yaitu Batuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) tidak memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Dan kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan di

bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

Dora (2017) membahas mengenai pengaruh tingkat kesehatan, Pendidikan dan investasi terhadap kemiskinan di Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Padang. Dan dimana terdapat pengaruh yang 40 negatif dan signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Padang. Serta terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel investasi terhadap kemiskinan. Dan Secara simultan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan investasi berpengaruh terhadap kemiskinan.

2.3.Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ▶ Secara Parsial
-▶ Secara Simultan

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2020). Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1) dan kesehatan (X_2) terhadap kemiskinan (Y) di Sumatera Selatan Periode Tahun 2009 - 2023.